

## Struktur Kepemilikan dan Pengungkapan Emisi Karbon: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi

**Khurina Roihan Akhsani<sup>1</sup>, Nurmadi Harsa Sumarta<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Juni 26, 2025  
 Revised Juni 26, 2025  
 Accepted Juni 26, 2025

#### Kata Kunci:

Struktur Kepemilikan,  
 Pengungkapan Emisi Karbon,  
 Kepemilikan Institusional,  
 Kepemilikan Manajerial,  
 Kepemilikan Publik

#### Keywords:

*Ownership Structure,  
 Carbon Emission Disclosure,  
 Institutional Ownership,  
 Managerial Ownership,  
 Public Ownership*

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2021 hingga 2023. Jenis kepemilikan yang dianalisis mencakup kepemilikan institusional, manajerial, serta publik. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan purposive sampling dan menghasilkan total 150 observasi. Analisis dilakukan menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 13. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga bentuk kepemilikan tersebut, yakni institusional, manajerial, dan publik, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

### ABSTRACT

*This research is to examine how ownership structure affects the disclosure of carbon emissions in energy sector firms that are listed between 2021 and 2023 on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Public, managerial, and institutional ownership are among the ownership forms that have been examined. A purposive sample technique was used to gather data from 150 business observations. EViews 13 software was used to do multiple linear regression data analysis. The study's findings demonstrate that disclosure of carbon emissions is significantly impacted negatively by the three ownership types—institutional, managerial, and public.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Khurina Roihan Akhsani  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret  
 Surakarta, Indonesia  
 Email: [inakhurina282@student.uns.ac.id](mailto:inakhurina282@student.uns.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan menjadi perhatian global yang semakin mendesak, terutama terkait dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Fenomena ini diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), terutama karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), gas metana (CH<sub>4</sub>), nitrogen dioksida (N<sub>2</sub>O), dan *chlorofluorocarbons* (CFC) di atmosfer [1]. Pencemaran gas karbon ini menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, serta bencana alam yang semakin sering terjadi.

Ironisnya, emisi karbon di dunia justru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari *Climate Watch* (2024), penyumbang emisi karbon terbesar di dunia yaitu sektor energi yang mampu menghasilkan 37,41 gigaton karbon dioksida ekuivalen (Gt CO<sub>2</sub>e) atau setara dengan 75% dari total emisi global. Sebagian besar emisi tersebut berasal dari sektor kelistrikan, dimana hampir 40% emisi CO<sub>2</sub> global dihasilkan oleh pembangkit listrik. Kekhawatiran lingkungan yang utama adalah potensi emisi gas rumah kaca yang terus meningkat. Ada banyak tekanan pada bisnis untuk melakukan dekarbonisasi dan bersikap transparan tentang jejak karbon mereka karena situasi ini.

Pengungkapan emisi karbon merupakan indikator yang baik dari bisnis yang bertanggung jawab dan sadar lingkungan. Namun, tugas ini tidak hanya terbatas pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mencakup tugas yang harus dilakukan terhadap para pemangku kepentingan perusahaan [2]. Kepercayaan dan dukungan dari para *stakeholder* akan meningkat apabila perusahaan mampu menyeimbangkan antara kepentingan mereka dengan tujuan perusahaan.

Meskipun demikian, pengungkapan emisi karbon saat ini masih bersifat pengungkapan sukarela di banyak negara, termasuk Indonesia. Artinya, perusahaan tidak diwajibkan secara hukum untuk melaporkan emisi karbon mereka secara transparan. Oleh sebab itu, tidak semua perusahaan melakukan pengungkapan mengenai jumlah emisi karbon yang dihasilkannya. Motivasi dan tingkat pengungkapan emisi karbon antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya pun juga dapat berbeda, tergantung pada berbagai macam faktor. Salah satu faktor yang signifikan adalah struktur kepemilikan perusahaan.

Struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi pengawasan institusional dan alasan dibalik pengungkapan informasi oleh perusahaan. Berbagai jenis struktur kepemilikan, seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik, merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melaporkan aktivitas yang terkait dengan perubahan iklim [3]. Perbedaan jenis kepemilikan ini mencerminkan tingkat keterlibatan yang bervariasi dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengungkapan informasi, termasuk dalam hal pengungkapan emisi karbon.

Dalam teori tata kelola perusahaan (*corporate governance*), pemegang saham dengan karakteristik tertentu dapat mendorong perusahaan untuk bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab. Struktur kepemilikan saham yang melibatkan institusi, seperti oleh perusahaan investasi atau dana pensiun, mungkin menuntut transparansi yang lebih tinggi guna memenuhi ekspektasi pemegang saham yang berorientasi pada kinerja jangka panjang. Di sisi lain, kepemilikan manajerial dapat mendorong pengungkapan emisi karbon yang lebih bertanggung jawab karena manajer atau eksekutif yang memiliki saham dalam perusahaan memiliki insentif langsung untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Sementara itu, perusahaan dengan kepemilikan publik sering kali menghadapi tekanan regulasi dan ekspektasi publik yang lebih tinggi terkait komitmen mereka terhadap pengelolaan dampak lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, pengungkapan emisi karbon, khususnya di sektor energi, sering kali masih terbatas. Beberapa perusahaan hanya memenuhi kewajiban minimum sesuai dengan regulasi tanpa melakukan inisiatif lebih lanjut. Kepemilikan institusional tidak selalu memberikan dampak positif jika orientasi investornya lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek. Kepemilikan manajerial, yang diharapkan menjadi penggerak utama, justru kadang menghambat pengungkapan jika hal tersebut dianggap merugikan kepentingan finansial pribadi. Begitu pula dengan kepemilikan publik yang cenderung menghadapi tantangan dalam memberikan tekanan langsung kepada manajemen. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami pengaruh dari masing-masing jenis struktur kepemilikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini akan berfokus pada tiga jenis kepemilikan utama, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik, untuk menganalisis sejauh mana masing-masing struktur kepemilikan dapat mendorong atau menghambat pengungkapan emisi karbon.

## 2. METODE

Populasi penelitian ini adalah 87 perusahaan yang seluruhnya bergerak di sektor energi dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021–2023. Peneliti menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu strategi pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, untuk menyusun data ini. Untuk memenuhi syarat, perusahaan harus memenuhi tiga persyaratan: (1) tercatat di BEI pada sektor energi pada tahun 2021–2023; (2) menerbitkan laporan tahunan atau laporan keberlanjutan pada tahun 2021–2023 yang dapat diakses melalui situs web BEI atau situs web perusahaan; dan (3) menyediakan semua data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, termasuk data variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh jumlah akhir sampel sebanyak 150 observasi, yang merupakan akumulasi dari data tahunan perusahaan yang memenuhi syarat selama periode penelitian.

Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol merupakan tiga jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kepemilikan publik, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Pengungkapan emisi karbon digunakan sebagai variabel dependen. Ukuran dan umur perusahaan serta ROA sebagai proksi untuk profitabilitas digunakan sebagai variabel kontrol. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen akan ditentukan dengan menganalisis data yang diperoleh menggunakan regresi linier berganda. Untuk memastikan asumsi model OLS (*Ordinary Least Square*) terpenuhi, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas dijalankan sebelum uji regresi. Selain itu, setiap variabel independen diuji sebagian menggunakan uji-t, dan uji hipotesis dilakukan menggunakan uji F dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Semua analisis data dilakukan menggunakan program EViews 13.

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Stakeholder

Menurut teori pemangku kepentingan, bisnis harus memikirkan bagaimana keputusan mereka dapat memengaruhi berbagai kelompok orang [3]. Teori ini juga berasumsi bahwa perusahaan mengungkapkan informasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan [4]. Dalam konteks ini, pengungkapan emisi karbon adalah cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan [5].

#### 2.1.2 Teori Legitimasi

Serupa dengan teori pemangku kepentingan, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus selalu mencari metode untuk memastikan tindakan mereka tidak bertentangan dengan nilai dan standar yang diterima masyarakat [6]. Perusahaan dan masyarakat tempat mereka beroperasi mengadakan “kontrak sosial” dengan cara ini. Menurut teori legitimasi, operasi perusahaan harus mematuhi norma dan nilai dalam masyarakat. Jika masyarakat menilai bahwa perusahaan telah melanggar norma sosial, maka legitimasi perusahaan dapat terancam [7]. Oleh karena itu, perusahaan harus secara proaktif menyesuaikan kebijakan dan operasional mereka untuk memastikan bahwa mereka tetap selaras dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### 2.1.3 Pengungkapan Emisi Karbon

Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), pengungkapan emisi karbon adalah pelaporan informasi terkait dampak emisi dan cara mengelola dampak tersebut oleh suatu organisasi/perusahaan. Pengungkapan emisi karbon adalah salah satu tuntutan pemangku kepentingan kepada perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas dan operasi mereka yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim [3]. Pengungkapan ini berkaitan dengan seberapa terbuka dan sistematis sebuah perusahaan mengomunikasikan emisi gas rumah kaca (GRK) dan strategi mitigasinya kepada para pemangku kepentingan [8]. Dengan melakukan pengungkapan emisi karbon, perusahaan tidak hanya memenuhi

harapan pemangku kepentingan, tetapi juga berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.

#### 2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada saham yang dimiliki oleh entitas seperti perbankan, dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, dan institusi lain [9]. Investor institusional dianggap lebih berkuasa dibandingkan dengan investor individu karena mereka memainkan peran penting dalam kebijakan pengungkapan perusahaan [3]. Investor institusional juga memiliki kesempatan unik untuk mempengaruhi dan terlibat dengan manajemen perusahaan. Bahkan, sebagian besar investor institusional menggunakan beberapa bentuk keterlibatan perusahaan untuk mencapai tujuan mereka [10].

#### 2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Istilah kepemilikan manajerial merujuk pada persentase total saham perusahaan yang dimiliki oleh individu dalam peran manajerial [11]. Meskipun pemilik manajerial adalah bagian internal dari organisasi, teori kelembagaan baru (*neo-institutional theory*) menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada kinerja ekonomi, tetapi juga menyesuaikan diri dengan norma sosial dan lingkungan karena adanya tekanan sosial [12]. Dengan menyatukan kepentingan manajer dan pemegang saham, kepemilikan manajerial dapat membantu meredakan kekhawatiran agensi. Dengan memberikan kepemilikan kepada manajer, konsentrasi kepentingan ini dapat tercapai [13].

#### 2.1.6 Kepemilikan Publik

Publik merupakan anggota masyarakat umum atau entitas non-afiliasi lainnya yang memiliki sebagian kecil dari jumlah total saham yang beredar [14]. Mereka yang berada di luar manajemen yang tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan dan memiliki kurang dari lima persen saham perusahaan dianggap sebagai bagian dari publik. Melalui media massa, kepemilikan publik memiliki dampak substansial pada kebijakan dan tindakan perusahaan melalui kritik dan komentar, yang dipandang sebagai tujuan dan sudut pandang masyarakat [15].

#### 2.1.7 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori stakeholder dan teori legitimasi mengasumsikan bahwa investor institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan manajerial dalam melaporkan informasi terkait emisi karbon [10][14]. Teori stakeholder juga menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon akan memenuhi tuntutan investor institusional [10]. Sejalan dengan hal itu, teori legitimasi berpendapat bahwa perusahaan seharusnya menyediakan lebih banyak informasi terkait emisi karbon guna menunjukkan kepada investor institusional bahwa perusahaan beroperasi demi kepentingan terbaik masyarakat [14]. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Jaggi et al. (2018) yang mengungkap hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan tingkat pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini:

H<sub>1</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

#### 2.1.8 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam menyelaraskan pandangan antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja perusahaan [4]. Konsentrasi kepemilikan manajerial yang tinggi memungkinkan manajer untuk mendominasi perusahaan dan menentukan strategi serta kebijakan terkait perilaku sosial organisasi. Namun, dalam konteks perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi, kecenderungan

untuk memenuhi tuntutan publik dapat menurun. Akuntabilitas publik mungkin dianggap kurang penting karena kepentingan pihak luar relatif kecil.

Selain itu, karena tingkat perhatian publik terhadap perusahaan tertutup relatif rendah, jenis perusahaan ini cenderung kurang aktif dalam aktivitas sosial, termasuk pengungkapan informasi terkait emisi karbon, karena biaya yang dikeluarkan kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat potensial yang diperoleh [15]. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Saeed et al. (2024) dan Utami et al. (2022) yang menyatakan bahwa “kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon”. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini:

H<sub>2</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

### 2.1.9 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI adalah suatu bisnis di mana anggota masyarakat memiliki saham. Hal ini mengharuskan mereka untuk melaporkan dan menginformasikan semua aktivitas perusahaan kepada publik, yang berperan sebagai pemegang saham. Namun, porsi kepemilikan saham publik ini bervariasi antara satu perusahaan dengan lainnya. Perusahaan berada di bawah tekanan yang meningkat untuk lebih terbuka dan jujur tentang kewajiban sosial mereka seiring bertambahnya jumlah pemegang saham publik [16]. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Suwandi et al. (2022) yang menyatakan bahwa “kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon”. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini:

H<sub>3</sub>: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dilakukan sebagai tahap awal dalam mengolah data penelitian, dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik umum dari data yang digunakan. Proses ini mencakup penghitungan nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), serta simpangan baku dari masing-masing variabel dalam penelitian. Hasil dari statistik deskriptif tersebut ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
CED	150	0,3448	1,0000	0,0000	0,2649
INSTOWN	150	0,6447	1,0000	0,0000	0,2647
MANOWN	150	0,0591	1,0000	0,0000	0,1671
PUBOWN	150	0,2470	0,7957	0,0000	0,1770
SIZE	150	21,9695	29,1520	14,3261	3,8544
AGE	150	22,9600	49,000	4,0000	9,8634
ROA	150	0,11311	1,0205	-0,3836	0,1832

Sumber: Hasil olah data EViews 13

Berdasarkan tabel 1, tingkat pengungkapan emisi karbon (CED) di Indonesia selama periode pengamatan masih relatif rendah, dengan rata-rata sebesar 0,3447. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan energi belum sepenuhnya transparan atau belum menjadikan isu emisi karbon sebagai prioritas utama dalam laporan mereka. Fakta bahwa nilai minimum CED adalah 0 mengindikasikan masih adanya perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengungkapan terkait emisi karbon.

Kepemilikan institusional (INSTOWN) memiliki rata-rata yang tinggi, yaitu 64,47%. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas saham perusahaan dikuasai oleh institusi, yang dalam banyak literatur sering dikaitkan dengan tata kelola yang lebih baik karena institusi cenderung memiliki kepentingan jangka panjang dan kemampuan monitoring yang lebih besar. Sebaliknya, kepemilikan manajerial

(MANOWN) sangat rendah, dengan rata-rata hanya 5,9%, yang mengindikasikan minimnya insentif langsung dari manajemen untuk meningkatkan kinerja jangka panjang, termasuk dalam aspek keberlanjutan. Sementara kepemilikan publik (PUBOWN) cukup variatif, dengan rata-rata 24,71%, mencerminkan adanya ruang partisipasi investor publik meski tetap berada di bawah institusi.

Ukuran perusahaan (SIZE) yang cenderung tinggi (rata-rata log total aset 21,97) menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perusahaan besar. Hal ini bisa menjadi relevan mengingat perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan tekanan publik untuk melakukan pengungkapan keberlanjutan, termasuk isu emisi karbon. Umur perusahaan (AGE) yang rata-rata hampir 23 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel telah lama beroperasi, sehingga memiliki pengalaman dan stabilitas dalam menjalankan bisnisnya—yang bisa berdampak pada kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan pengungkapan informasi non-keuangan.

Terakhir, profitabilitas (ROA) yang rata-rata sebesar 11,31% menandakan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel cukup mampu menghasilkan laba dari asetnya. Namun, nilai minimum ROA yang sangat rendah bahkan negatif (-38,36%) menunjukkan adanya ketimpangan performa keuangan, yang dapat memengaruhi kemampuan dan kemauan perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon.

Sebelum dilakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	INSTOWN	MANOWN	PUBOWN	SIZE	AGE	ROA
INSTOWN	1	-0.6065	-0.5635	-0.1814	0.0700	0.1582
MANOWN	-0.6065	1	-0.1046	0.2244	-0.1344	0.1032
PUBOWN	-0.5635	-0.1046	1	-0.1244	0.0363	-0.3287
SIZE	-0.1814	0.2244	-0.1244	1	-0.0042	-0.1037
AGE	0.0700	-0.1344	0.0363	-0.0042	1	-0.0299
ROA	0.1582	0.1032	-0.3287	-0.1037	-0.0299	1

Sumber: Hasil olah data EViews 13

Tabel 2 merupakan hasil dari uji multikolinearitas yang telah dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antarvariabel independen yang lebih besar dari 0,80. Hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.4077	0.1321	3.0861	0.0024
INSTOWN	-0.1323	0.0904	-1.4625	0.1457
MANOWN	-0.1237	0.1161	-1.0653	0.2885
PUBOWN	-0.0928	0.1125	-0.8255	0.4104
SIZE	-0.0061	0.0032	-1.9025	0.0591
AGE	0.0007	0.0012	0.5953	0.5525
ROA	0.0942	0.0620	1.5183	0.1311

Sumber: Hasil olah data EViews 13

Tabel 3 merupakan output dari uji *Glejser* yang digunakan untuk menentukan apakah model regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak. Berdasarkan temuan ini, semua nilai probabilitas variabel lebih tinggi dari ambang signifikansi 0,05. Dengan demikian, model regresi penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.4615	0.2355	6.2038	0.0000
INSTOWN	-0.5794	0.1593	-3.6361	0.0003
MANOWN	-0.4688	0.2043	-2.2945	0.0232
PUBOWN	-0.3992	0.1992	-2.0037	0.0469
SIZE	-0.0277	0.0058	-4.7780	0.0000
AGE	-0.0020	0.0021	-0.9394	0.3490
ROA	0.3433	0.1069	3.2089	0.0016
R-squared	0.2347	Mean dependent var		0.2163
Adjusted R-squared	0.2025	S.D. dependent var		0.2112
S.E. of regression	0.1886	Sum squared resid		5.0904
F-statistic	7.3093	Durbin-Watson stat		1.6343
Prob(F-statistic)	0.0000			

Sumber: Hasil olah data Eviews 13

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4, nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional (INSTOWN) adalah sebesar  $0,0003 < 0,050$  dengan arah pengaruh negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon”. Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon justru menurun. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon” tidak dapat diterima.

Meskipun sering dianggap sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam tata kelola perusahaan, investor institusional tidak selalu bertindak demi kepentingan seluruh pemegang saham. Dalam beberapa kondisi, investor institusional dapat menghambat pengungkapan informasi sukarela yang bersifat sensitif kepada publik guna memaksimalkan keuntungan pribadi. Hal ini berpotensi merugikan pemegang saham minoritas serta meningkatkan intensitas konflik keagenan di dalam perusahaan [17]. Tindakan tersebut sering kali didasari oleh kepentingan jangka pendek, di mana pengungkapan informasi lingkungan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif pasar dianggap dapat memengaruhi kinerja saham atau laba dalam jangka pendek. Akibatnya, informasi penting mengenai dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan tidak terpublikasi secara luas kepada publik.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Acar et al. (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan lingkungan yang lebih rendah, termasuk di dalamnya pengungkapan emisi karbon [18]. Penelitian yang dilakukan oleh Oyerogba et al. (2025) juga mengungkapkan bahwa ketika institusi melakukan investasi besar pada suatu perusahaan, mereka cenderung mendukung pengungkapan informasi karbon yang lemah karena hal tersebut memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi pemegang saham minoritas. Dengan posisi dan kepemilikan yang kuat, investor institusional bisa saja menggunakan pengaruhnya untuk mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri, termasuk menekan manajemen agar tidak membuka informasi yang bisa merugikan harga saham atau citra perusahaan. Ini menimbulkan konflik keagenan, terutama dengan pemegang saham minoritas yang tidak memiliki akses ke informasi internal.

Sementara itu, nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan manajerial (MANOWN) adalah sebesar  $0,0232 < 0,050$  dengan arah pengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa “kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon”. Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon justru menurun. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon” dapat diterima.

Kecenderungan penurunan tingkat pengungkapan emisi karbon ini dapat dikaitkan dengan adanya *entrenchment effect* pada pihak manajerial, yaitu kondisi di mana manajer yang mengendalikan sebagian besar ekuitas perusahaan mungkin memiliki kekuatan suara yang cukup untuk mengubah strategi perusahaan demi kepentingan pribadi mereka. Apabila tidak diawasi, mereka bisa saja mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan tidak memberi nilai tambah bagi perusahaan [19]. Dalam konteks ini, manajer tersebut mungkin hanya peduli pada keuntungan jangka pendek yang lebih mudah dicapai daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang dari inisiatif lingkungan atau pengungkapan terkait emisi karbon. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2022) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan kepemilikan yang besar dan sedikit pengawasan dari pihak lain, manajer lebih cenderung untuk menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan bagi mereka, termasuk data tentang emisi karbon yang dapat berisiko merugikan reputasi perusahaan atau mengarah pada biaya lebih tinggi terkait regulasi lingkungan [20].

Selanjutnya, nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan publik (PUBOWN) adalah sebesar  $0,0469 < 0,050$  dengan arah pengaruh negatif. Hal ini berarti bahwa “kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon”. Jadi, secara umum, emisi karbon suatu perusahaan akan lebih rendah jika persentase sahamnya lebih besar dimiliki oleh publik. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon” tidak dapat diterima.

Temuan ini berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang belum secara spesifik menemukan pengaruh negatif dari kepemilikan publik terhadap pengungkapan emisi karbon, seperti penelitian yang dilakukan oleh Julekhah & Rahmawati (2019) dan Suwandi et al. (2022), yang menyatakan bahwa “kepemilikan publik justru berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan emisi karbon”. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan melalui karakteristik pemegang saham publik yang umumnya tersebar (*dispersed ownership*) dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi kebijakan manajemen secara langsung. Pemegang saham publik biasanya tidak terlibat aktif dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan pengungkapan informasi lingkungan, sehingga dorongan atau tekanan terhadap perusahaan untuk transparan dalam hal emisi karbon pun menjadi rendah.

Selain itu, investor publik umumnya lebih berfokus pada informasi keuangan jangka pendek, seperti laba dan dividen, dibandingkan aspek non-keuangan seperti tanggung jawab lingkungan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki insentif yang cukup kuat untuk secara sukarela mengungkapkan informasi terkait emisi karbon ketika mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik. Di sisi lain, rendahnya literasi atau kesadaran publik terhadap isu keberlanjutan juga turut berkontribusi terhadap lemahnya tekanan yang diberikan kepada perusahaan [21]. Akibatnya, perusahaan cenderung menurunkan intensitas pengungkapan informasi lingkungan karena dianggap tidak memengaruhi keputusan investasi mayoritas investor publik secara langsung.

Penelitian ini juga menguji tiga variabel kontrol, yakni ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 dan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk mengungkapkan emisi karbon, yang kemungkinan disebabkan oleh kompleksitas operasional, tingginya biaya pelaporan, serta kekhawatiran terhadap tekanan publik dan regulasi tambahan.

Untuk variabel umur perusahaan, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,3490 yang melebihi tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Lama berdirinya perusahaan tidak secara langsung mencerminkan kepedulian terhadap transparansi lingkungan, karena hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi dan tuntutan pemangku kepentingan.

Sementara itu, profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA) menunjukkan nilai probabilitas 0,0016 dengan arah hubungan positif. Temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik cenderung lebih mampu melaksanakan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga reputasi dan legitimasi sosial di mata publik.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Ketiga bentuk kepemilikan—institusional, manajerial, dan publik—secara keseluruhan memberikan dampak negatif dan signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa dominasi pemegang saham dengan orientasi jangka pendek dapat menjadi penghambat transparansi dalam menyampaikan informasi terkait isu lingkungan. Kepemilikan institusional dan manajerial yang cenderung berorientasi pada kestabilan laba, serta kepemilikan publik yang cenderung tersebar dan kurang terlibat secara strategis, turut berkontribusi terhadap rendahnya pelaporan emisi karbon. Sementara itu, dari variabel kontrol yang diteliti, ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan umur perusahaan tidak memiliki dampak yang signifikan. Di sisi lain, profitabilitas menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, menandakan bahwa perusahaan dengan performa keuangan yang baik lebih siap dan berkomitmen dalam mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan pelaporan keberlanjutan.

#### REFERENSI

- [1] A. K. Nisa, “Effect of Carbon Emission Disclosure on Company Value with Environmental Performance as Moderating Variable in Non-Financial Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange,” 2023. [Online]. Available: <https://pusdig.web.id/index.php/accounting/>
- [2] N. P. E. Dewayani and N. M. D. Ratnadi, “Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pengungkapan Emisi Karbon,” *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 31, no. 4, Feb. 2021, doi: 10.24843/eja.2021.v31.i04.p04.
- [3] A. Bedi and B. Singh, “Does ownership structure affect carbon emission disclosure?,” *Asian Review of Accounting*, 2024, doi: 10.1108/ARA-11-2023-0307.
- [4] H. Al Amosh and S. F. A. Khatib, “Ownership structure and environmental, social and governance performance disclosure: the moderating role of the board independence,” *Journal of Business and Socio-economic Development*, vol. 2, no. 1, pp. 49–66, Apr. 2022, doi: 10.1108/jbsed-07-2021-0094.
- [5] S. M. Bae, M. A. K. Masud, and J. D. Kim, “A cross-country investigation of corporate governance and corporate sustainability disclosure: A signaling theory perspective,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 10, no. 8, Jul. 2018, doi: 10.3390/su10082611.
- [6] I. Ulum, *Intellectual Capital (Model Pengukuran, Framework Pengungkapan, dan Kinerja Organisasi)*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- [7] C. Deegan, “Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation,” Aug. 01, 2002. doi: 10.1108/09513570210435852.
- [8] M. Singhanian and I. Bhan, “Firm ownership structure and voluntary carbon disclosure: a systematic review and meta-analysis,” 2024, *Emerald Publishing*. doi: 10.1108/SAMPJ-08-2023-0613.
- [9] N. W. Rustiarini, “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility,” *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 104–119, 2011.
- [10] J. Cotter and M. M. Najah, “Institutional investor influence on global climate change disclosure practices,” *Australian Journal of Management*, vol. 37, no. 2, pp. 169–187, Aug. 2012, doi: 10.1177/0312896211423945.
- [11] M. D. Utami, E. Saraswati, and L. Purwati, “Factors influencing the carbon emissions disclosure in basic and chemical industrial companies listed on the IDX in 2016-2019,” *International Journal*

- of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, vol. 11, no. 9, pp. 193–204, Dec. 2022, doi: 10.20525/ijrbs.v11i9.2219.
- [12] Y. Nuhu and A. Alam, “Ownership structure and sustainability reporting: emerging economies evidence,” *International Journal of Accounting and Information Management*, Sep. 2024, doi: 10.1108/IJAIM-09-2023-0228.
- [13] N. Nurleni, A. Bandang, Darmawati, and Amiruddin, “The effect of managerial and institutional ownership on corporate social responsibility disclosure,” *International Journal of Law and Management*, vol. 60, no. 4, pp. 979–987, Jul. 2018, doi: 10.1108/IJLMA-03-2017-0078.
- [14] B. Jaggi, A. Allini, R. Macchioni, and C. Zagaria, “The Factors Motivating Voluntary Disclosure of Carbon Information: Evidence Based on Italian Listed Companies,” *Organ Environ*, vol. 31, no. 2, pp. 178–202, Jun. 2018, doi: 10.1177/1086026617705282.
- [15] A. Khan, M. B. Muttakin, and J. Siddiqui, “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy,” *Journal of Business Ethics*, vol. 114, no. 2, pp. 207–223, May 2013, doi: 10.1007/s10551-012-1336-0.
- [16] F. Julekhah and E. Rahmawati, “Pengaruh Media Exposure, Sensitivitas Industri, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Publik dan Profitabilitas Terhadap Environmental Disclosure dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan,” 2019.
- [17] E. O. Oyerogba *et al.*, “The Roles of Ownership Structure on Carbon Emission Disclosure Quality of the Listed Oil and Gas Companies in Nigeria,” *International Journal of Energy Economics and Policy*, vol. 15, no. 1, pp. 25–35, 2025, doi: 10.32479/ijeep.17230.
- [18] E. Acar, K. Tunca Çalhyurt, and Y. Zengin-Karaibrahimoglu, “Does ownership type affect environmental disclosure?,” *Int J Clim Chang Strateg Manag*, vol. 13, no. 2, pp. 120–141, 2021, doi: 10.1108/IJCCSM-02-2020-0016.
- [19] Y. G. Shan, Q. Tang, and J. Zhang, “The impact of managerial ownership on carbon transparency: Australian evidence,” *J Clean Prod*, vol. 317, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128480.
- [20] U. F. Saeed, R. Kamil, and I. Wiredu, “The moderating role of technological innovation on ownership structure, financing decisions and environmental accounting disclosure,” *Cogent Business and Management*, vol. 11, no. 1, 2024, doi: 10.1080/23311975.2024.2396543.
- [21] A. Dyck, K. V. Lins, L. Roth, and H. F. Wagner, “Do institutional investors drive corporate social responsibility? International evidence,” *J financ econ*, vol. 131, no. 3, pp. 693–714, Mar. 2019, doi: 10.1016/j.jfineco.2018.08.013.